Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 108 - 115

Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran: Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah

Karikarti[1*], Kristian H.P Lambe[2], Baharuddin[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
karikartisadari@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri dari pegawai DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dan pelaporan LRA telah berjalan dengan mekanisme yang cukup terstruktur, melibatkan pengelola anggaran, staf keuangan, auditor internal, serta pimpinan dinas. Namun, efektivitas pelaksanaan LRA masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan pemahaman regulasi dan prinsip dasar pengelolaan anggaran, keterlambatan penyampaian data, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya akurat dan tepat waktu. Meski demikian, LRA terbukti berperan sebagai alat pengendalian, karena menjadi dasar monitoring, evaluasi, serta penyesuaian kebijakan anggaran. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem informasi keuangan untuk mendukung tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan, khususnya pada instansi pemerintah daerah di provinsi baru.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, pengendalian anggaran, akuntabilitas, tata kelola keuangan, Papua Tengah.

Abstract: *This study aims to analyze the Budget Realization Report (Laporan Realisasi Anggaran, LRA) as an instrument to evaluate budget implementation at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Central Papua Province. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. Six informants, consisting of DPMPTSP employees, participated in the study. The findings reveal that the preparation and reporting process of the LRA has been carried out in a relatively structured manner, involving budget managers, finance staff, internal auditors, and organizational leaders. However, the effectiveness of LRA implementation is constrained by several challenges, including limited understanding of budget management regulations, delays in data submission, and the absence of fully integrated financial information systems. These issues have hindered the accuracy and timeliness of the reports. Nevertheless, the LRA functions as a control tool by serving as the basis for monitoring, evaluation, and budget adjustments. The study underscores the need for capacity building among human resources and the development of more advanced financial information systems to enhance accountability, transparency, and financial governance, particularly in newly established provincial institutions.*

Keywords: *Budget Realization Report, budget control, accountability, financial governance, Central Papua.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah karena menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya dalam satu periode. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat pengendalian dalam memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sabrina, Suwandi, & Suhartono, 2024). Dengan demikian, keberadaan LRA sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan LRA di pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal. Susanto, Rambano, dan Panji (2022) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi yang digunakan. Sementara itu, Raditya, Ermawati, Aswar, Andreas, dan Panjaitan (2022) menegaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah serta pendapatan transfer dari pusat berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan laporan keuangan daerah. Penelitian lain oleh Rahanratat (2024) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah di Kota Ambon masih rendah, dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat, yang berimplikasi pada lemahnya kapasitas fiskal dalam menyusun laporan yang akuntabel.

Dalam konteks Papua Tengah sebagai provinsi baru, tantangan serupa juga dihadapi, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meskipun penyusunan LRA telah berjalan secara terstruktur, penelitian awal menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, keterlambatan penyampaian data, serta keterbatasan sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi secara penuh. Kondisi ini berdampak pada ketepatan waktu dan akurasi laporan yang dihasilkan, sehingga berpotensi melemahkan fungsi LRA sebagai alat pengendalian keuangan daerah.

Tabel berikut menyajikan hasil temuan penelitian terkait tantangan pengelolaan laporan realisasi anggaran di berbagai daerah di Indonesia:

Tabel 1. Data pendukung fenomena

Isu/Fenomena	Deskripsi	Sumber (Tahun)
Kemandirian fiskal rendah	Rasio kemandirian fiskal Kota Ambon masih di bawah 20%	Rahanratat (2024)
Pengaruh kompetensi SDM dan sistem akuntansi	Kualitas laporan keuangan dipengaruhi signifikan oleh SDM dan sistem akuntansi	Susanto et al. (2022)
Keterbukaan laporan keuangan daerah	Kemandirian keuangan & transfer pusat berpengaruh positif terhadap keterbukaan	Raditya et al. (2022)

Sumber: Dari penelitian terdahulu (2025)

Sumber data di atas memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan LRA berkaitan erat dengan kualitas SDM, kemandirian fiskal, serta infrastruktur sistem informasi keuangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada konteks Papua Tengah sebagai provinsi baru yang sedang membangun tata kelola birokrasi dan fiskalnya. Keterbatasan kapasitas SDM, minimnya pemahaman terhadap regulasi keuangan, serta lemahnya sistem informasi yang terintegrasi dapat menghambat efektivitas LRA sebagai alat pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi LRA di DPMPTSP Papua Tengah sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan anggaran di daerah yang sedang bertumbuh.

TINJAUAN LITERATUR

Good Governance dalam Penggunaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah salah satu instrumen fundamental dalam tata kelola keuangan daerah (*public financial governance*) karena mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran di sektor pemerintahan (Sabrina, Suwandi, & Suhartono, 2024). Implementasi LRA secara optimal mendorong *good governance* dengan menyediakan informasi realisasi yang akurat sebagai dasar evaluasi dan pengendalian anggaran dalam satu periode pelaporan.

Definisi Operasional

Laporan Realisasi Anggaran (LRA): laporan yang mencatat realisasi pendapatan dan

belanja daerah/instansi dalam suatu periode, mencerminkan capaian terhadap anggaran awal.

SDM dan Sistem Akuntansi: kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta pemanfaatan sistem informasi dalam menyusun LRA (Susanto, Rambano, & Panji, 2022).

Kemandirian Fiskal: kapasitas daerah dalam membiayai pengeluaran melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan transfer pusat (Rahanratat, 2024; Raditya et al., 2022).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini penulis rangkum dalam **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul/Objek Penelitian	Metode	Temuan Utama
Sary, Hijriah, & Karpriana (2023)	Analisis kualitas penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten Bengkayang	Deskriptif kualitatif	Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi; kepatuhan terhadap SAP masih terbatas. Perlu perbaikan sistem pelaporan agar lebih akuntabel.
Susanto, Rambano, & Panji (2022)	Pengaruh kompetensi SDM dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Kuantitatif	Kompetensi SDM dan efektivitas sistem akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Raditya, Ermawati, Aswar, Andreas, & Panjaitan (2022)	Faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan laporan keuangan daerah	Kuantitatif regresi panel	Kemandirian keuangan daerah dan besarnya transfer dari pusat berpengaruh positif terhadap keterbukaan laporan keuangan daerah.
Rahanratat (2024)	Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon ditinjau dari rasio keuangan	Analisis rasio keuangan	Kemandirian fiskal Kota Ambon masih sangat rendah (<20%), sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat tinggi dan berdampak pada lemahnya kapasitas laporan keuangan.
Bank Dunia (2023)	Program SINERGIS: reformasi sistem keuangan daerah di Indonesia	Studi kebijakan	Dukungan terhadap penguatan sistem akuntansi dan belanja daerah melalui DAU/DAK lebih efektif, efisiensi belanja, serta peningkatan akuntabilitas fiskal.

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Research Gap

Berikut beberapa celah penelitian yang belum sepenuhnya dijawab oleh studi sebelumnya:

Tabel 3. Research Gap

Research Gap	Keterangan
1. Fokus khusus pada DPMPTSP Papua Tengah	Belum ada studi empiris terkait implementasi LRA di instansi baru seperti DPMPTSP di provinsi baru seperti Papua Tengah.
2. Kombinasi faktor teknis dan fiskal	Studi terdahulu cenderung memisahkan analisis antara SDM/sistem dan kemandirian fiskal; sedikit yang menggabungkan kedua dimensi.
3. Peran regulasi dan integrasi TI di daerah baru	Kurangnya analisis tentang bagaimana pemahaman regulasi dan digitalisasi sistem informasi keuangan memengaruhi kualitas LRA secara bersamaan.
4. Konteks lokal Papua Tengah	Studi terdahulu lebih banyak pada daerah Jawa/Indonesia Barat; konteks unik Papua Tengah (baru, geografis, kelembagaan) belum diteliti.

Sumber: Penulis (2025)

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa efektivitas LRA dalam tata kelola keuangan daerah dipengaruhi oleh dimensi teknis (kompetensi SDM, sistem informasi), fiskal (kemandirian anggaran), dan dukungan kebijakan (reformasi fiskal). Namun, penelitian dalam konteks instansi seperti DPMPTSP Papua Tengah masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk menjawab gap tersebut dengan mengintegrasikan analisis teknis, fiskal, dan kebijakan dalam konteks lembaga pemerintah daerah yang baru dan memiliki tantangan unik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di DPMPTSP Provinsi Papua Tengah?
3. Bagaimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan anggaran di DPMPTSP Provinsi Papua Tengah?

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena pengelolaan dan pemanfaatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam konteks pemerintahan daerah secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi dari perspektif aktor yang terlibat, sekaligus menangkap kompleksitas proses pelaksanaan anggaran di lapangan (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2020). Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pelaporan dan pengendalian anggaran di instansi pemerintah daerah.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan LRA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Mengingat sifat penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperoleh enam informan utama yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan pegawai bidang keuangan. Jumlah ini dianggap memadai dalam penelitian kualitatif, karena fokusnya adalah kualitas data, bukan kuantitas responden (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

Lokasi penelitian ditetapkan di DPMPTSP Provinsi Papua Tengah, yang merupakan instansi strategis dalam mendukung tata kelola investasi dan pelayanan publik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Papua Tengah sebagai provinsi baru masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola birokrasi, khususnya dalam pelaporan dan pengendalian anggaran. Penelitian dilakukan selama periode Januari–Maret 2025, dengan mempertimbangkan ketersediaan informan dan dokumen anggaran yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami mekanisme penyusunan laporan dan dinamika internal organisasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman informan secara lebih mendalam, sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa salinan LRA, peraturan keuangan daerah, dan dokumen administratif lainnya. Triangulasi sumber data dilakukan guna meningkatkan validitas hasil penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang memudahkan pemahaman mengenai proses, kendala, dan fungsi LRA. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar merepresentasikan realitas empiris di lapangan (Miles et al., 2019). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terkait peran LRA dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan enam informan yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Komposisi responden terdiri dari satu Sekretaris Dinas, satu Bendahara, dua staf bidang keuangan, dan dua staf teknis yang turut terlibat dalam penyusunan serta pelaporan anggaran. Mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari lima tahun di pemerintahan daerah, meskipun pengalaman khusus di DPMPTSP Papua Tengah relatif singkat karena instansi ini baru berdiri setelah pemekaran provinsi. Latar belakang pendidikan responden umumnya sarjana di bidang administrasi publik, ekonomi, dan akuntansi, sehingga secara formal memenuhi kualifikasi dasar dalam pengelolaan anggaran.

Tabel 4. Karakteristik Responden

Kode Informan	Jabatan	Masa Kerja di Pemerintahan	Masa Kerja di DPMPTSP Papua Tengah	Pendidikan Terakhir	Keterangan Keterlibatan
Informan 1	Sekretaris Dinas	> 10 tahun	2 tahun	S2 Administrasi Publik	Koordinator utama penyusunan LRA dan pengendali

Kode Informan	Jabatan	Masa Kerja di Pemerintahan	Masa Kerja di DPMPTSP Papua Tengah	Pendidikan Terakhir	Keterangan Keterlibatan
					an anggaran
Informan 2	Bendahara	8 tahun	2 tahun	S1 Akuntansi	Penanggung jawab pengelolaan kas dan pelaporan realisasi keuangan
Informan 3	Staf Keuangan	6 tahun	2 tahun	S1 Ekonomi Pembangunan	Pengolah data realisasi belanja dan pendapatan
Informan 4	Staf Keuangan	5 tahun	1,5 tahun	S1 Akuntansi	Penyusun laporan triwulanan dan tahunan
Informan 5	Staf Teknis	7 tahun	2 tahun	S1 Administrasi Negara	Penyedia data kegiatan bidang teknis untuk LRA
Informan 6	Staf Teknis	4 tahun	1,5 tahun	S1 Ekonomi	Mendukung input data kegiatan dan realisasi anggaran

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Proses Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyusunan LRA dilakukan secara periodik setiap triwulan dan tahunan. Proses ini melibatkan koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan pimpinan dinas. Menurut salah satu staf keuangan:

> *"Kami sudah memiliki format standar sesuai pedoman Permendagri, namun kendalanya sering kali data dari bidang teknis datang terlambat sehingga pelaporan tidak bisa diselesaikan tepat waktu."* (Wawancara, Informan 3, Maret 2025).

Meskipun prosedur formal telah diikuti, keterlambatan data menyebabkan beberapa laporan bersifat *rekonsiliasi sementara* sebelum dapat diverifikasi secara penuh. Hal ini mengurangi efektivitas LRA sebagai instrumen pengendalian jangka pendek.

Faktor Penghambat Pelaksanaan LRA

Dari hasil analisis wawancara, ditemukan tiga faktor utama yang menghambat pelaksanaan LRA:

1. **Keterbatasan pemahaman regulasi** – Beberapa pegawai masih kesulitan memahami peraturan terbaru mengenai sistem akuntansi pemerintahan. Seorang bendahara menyampaikan:

   > *"Kami sering kali menunggu sosialisasi atau pelatihan dari BPKAD, karena perubahan regulasi cukup cepat dan tidak selalu kami pahami dengan jelas."* (Wawancara, Informan 2, Maret 2025).

2. **Keterlambatan penyampaian data** – Data realisasi belanja dari bidang teknis tidak selalu masuk sesuai jadwal.

3. **Keterbatasan teknologi informasi** – Sistem keuangan daerah belum terintegrasi penuh dengan aplikasi digital, sehingga masih banyak proses manual yang memperlambat pelaporan.

LRA sebagai Alat Pengendalian

Walaupun terdapat kendala, LRA tetap dimanfaatkan sebagai dasar monitoring dan evaluasi anggaran. Sekretaris Dinas menyebutkan:

> *"LRA tetap menjadi acuan utama kami dalam menilai apakah program berjalan sesuai target. Dari situ juga kami tahu mana kegiatan yang perlu direalokasi atau dikurangi."* (Wawancara, Informan 1, Februari 2025).

Dengan demikian, LRA berfungsi sebagai alat pengendalian meski efektivitasnya belum maksimal akibat keterlambatan dan ketidakakuratan data.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pertama, proses pelaksanaan LRA di DPMPTSP Papua Tengah telah mengikuti mekanisme formal, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh kendala internal.

Kedua, faktor penghambat utama teridentifikasi pada aspek regulasi, data, dan teknologi. Ketiga, meskipun terdapat kendala, LRA tetap berperan penting sebagai instrumen pengendalian anggaran.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Susanto et al. (2022) yang menekankan pentingnya kompetensi SDM dan sistem akuntansi dalam menentukan kualitas laporan keuangan daerah. Hal serupa juga dikemukakan Raditya et al. (2022), bahwa kemandirian fiskal dan tata kelola anggaran berhubungan erat dengan keterbukaan dan akuntabilitas laporan. Namun, berbeda dengan penelitian di daerah yang sudah mapan, konteks Papua Tengah menunjukkan tantangan unik sebagai provinsi baru, di mana aspek regulasi dan integrasi sistem informasi masih belum stabil. Hal ini menguatkan pandangan Rahanratat (2024) bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah lebih rentan terhadap permasalahan akuntabilitas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, percepatan integrasi teknologi informasi keuangan, serta penguatan koordinasi lintas bidang agar LRA dapat berfungsi optimal sebagai instrumen akuntabilitas dan pengendalian anggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan dan pelaporan LRA telah mengikuti prosedur formal sesuai dengan pedoman yang berlaku, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala pada aspek regulasi, keterlambatan data, dan keterbatasan teknologi informasi.

LRA terbukti berfungsi sebagai instrumen pengendalian anggaran karena digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan penyesuaian program. Namun, kendala internal menyebabkan kualitas laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya akurat dan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi LRA sebagai alat pertanggungjawaban publik masih perlu diperkuat melalui perbaikan kelembagaan dan teknis.

Secara teoretis, penelitian ini mempertegas temuan sebelumnya mengenai pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Susanto et al., 2022; Raditya et al., 2022). Kontribusi baru dari penelitian ini terletak pada konteks Papua Tengah sebagai provinsi baru, yang memperlihatkan tantangan unik berupa keterbatasan regulasi dan infrastruktur kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang implementasi LRA dalam kerangka tata kelola keuangan daerah di wilayah baru hasil pemekaran.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan reguler mengenai sistem akuntansi pemerintahan, penguatan koordinasi antar bidang dalam penyusunan laporan, serta percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah agar LRA dapat disusun secara akurat, transparan, dan tepat waktu. Upaya ini penting untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah di Papua Tengah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu instansi, yaitu DPMPTSP Papua Tengah, dengan jumlah informan terbatas. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan generalisasi temuan. Oleh karena itu, **penelitian selanjutnya** disarankan untuk melibatkan lebih banyak instansi pemerintah daerah di Papua Tengah maupun provinsi lain hasil pemekaran, serta menggunakan metode campuran (*mixed methods*) guna memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas LRA dalam mendukung tata kelola keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Christianingrum, C., Baharuddin, B., & Malissa, M. (2025). Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara tanpa Tunjangan Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 12–21. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/980

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1–4. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Halik, J. B., Rantererung, C. L., Sutomo, D. A., Rasinan, D., Daud, M., & Todingbua, M. A. (2024). *Era Disruptif* (J. B. Halik (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kKUDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA179&ots=GVM0GTeahE&sig=ixF8ruUsRR4KmAtdE_GYwrlvO4k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, *20*(1), 138–147. https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711

Lambe, K., Patiung, N., & Latiep, I. F. (2025). THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, *7*(1), 60–71. https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865

Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *8*(1), 171–180. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887

Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *2*(1), 45–51. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo : Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 70–78. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992/824

Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 108–119. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738

Raditya, T. A., Ermawati, E., Aswar, K., Andreas, A., & Panjaitan, I. (2022). Factors affecting the disclosure level of local government financial statements. *Investment Management and Financial Innovations, 19*(2), 239–248. https://doi.org/10.21511/imfi.19(2).2022.20

Rahanratat, N. (2024). Local government financial performance reviewed from financial ratios and indexes. *Financial and Accounting Indonesian Research, 4*(1), 20–38. https://doi.org/10.36232/fair.v4i1.1351

Sabrina, M., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2024). The role of budget realization reports in strengthening fiscal transparency. *Journal of Public Sector Accounting, 5*(1), 12–25.

Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 86–92. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862

Sary, D., Hijriah, H., & Karpriana, E. (2023). Analisis kualitas penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang. *International Journal of Economics,*

Finance and Management Sciences, 7(7), 45–52.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Y., Rambano, D., & Panji, M. (2022). The role of HRM factors in improving performance analysis of financial reporting in local governments. *Golden Ratio of Human Resource Management, 2*(1), 11–23. https://doi.org/10.52970/grhrm.v2i1.154

Tampang, G. I., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Pengaruh Pelatihan dan Pemanfaatan SIRUP terhadap Transparansi Pengadaan di Kabupaten Yahukimo Pendahuluan. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 1–11. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/977

World Bank. (2023, October 27). Indonesia: World Bank program to support more efficient local government spending. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/27/indonesia-world-bank-program-to-support-more-efficient-local-government-spending